

**PDRB Hijau Sektor Kehutanan Hutan Alam Kabupaten Tabalong
di Provinsi Kalimantan Selatan**

*Forestry Sector Green GRDP of Natural Forest Tabalong Regency
in South Kalimantan Province*

Savera Icmi*, M Anshar Nur

Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat

*savera.icmi@gmail.com

Abstract

This study examines the influence of (1) to identify the value of depletion, forest degradation, and depreciation Tabalong Regency in South Kalimantan Province (2) can see the value of Forestry Sector Green GRDP Tabalong Regency in South Kalimantan Province. Data is processed using the Green GRDP calculation method. This study proves that the value of the Forestry Sector Green GRDP is smaller than Conventional GRDP. This Green GDRP shows the implementation that the Tabalong Regency suffered losses due to the forest's exploitation. The result of the Forestry Sector Green GRDP calculation in 2015 amount to Rp -24,413 million, in 2016, amounting to Rp. -10.816 million, and 2017 amount to Rp28,665 million.

Keywords: *Depletion, Degradation, Depreciation, Conventional GRDP, Forestry Sector Green GRDP.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengidentifikasi nilai Deplesi, Degradasi, dan Depresiasi hutan kabupaten Tabalong di provinsi Kalimantan Selatan (2) dapat melihat nilai dari PDRB Hijau Sektor Kehutanan kabupaten Tabalong di provinsi Kalimantan Selatan . Data diolah dengan menggunakan metode perhitungan PDRB. Hasil penelitian membuktikan bahwa nilai dari PDRB Hijau Sektor Kehutanan lebih kecil daripada PDRB Konvensional. PDRB Hijau ini menunjukkan implementasi bahwa kabupaten Tabalong sebesarnya telah mengalami kerugian akibat eksploitasi tersebut. Hasil perhitungan PDRB Hijau Sektor Kehutanan pada tahun 2015 sebesar Rp-24.413 juta, pada tahun 2016 sebesar Rp-10.816 juta dan tahun 2017 sebesar Rp-28.665 juta.

Kata Kunci : *Deplesi, Degradasi, Depresiasi, PDRB Konvensional, PDRB Hijau Sektor Kehutanan.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan sebagai bagian hidup dari manusia mempunyai banyak peranan penting dalam kehidupan karena memiliki kegunaan yang dapat dimanfaatkan seperti sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan kekayaan lainnya yang dapat diolah kembali oleh manusia untuk menjadi barang-barang yang dapat diperdagangkan kembali. Hutan juga tidaklah merupakan kumpulan pepohonan saja, tetapi juga hutan merupakan persekutuan hidup alam hayati atau suatu masyarakat tumbuhan yang kompleks yang terdiri atas berbagai pohonan, semak-semak, tumbuhan bawah, jasad renik tanah, hewan dan lingkungannya (Arifin, 2001). Salah satu fungsi hutan yang juga mempunyai peran vital yaitu untuk memproduksi oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup bernapas karena itu hutan disebut juga paru-paru dunia serta juga hutan dapat

mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh asap dari industri-industri sehingga hutan dapat menjaga kesehatan pernapasan masyarakat menjadi lebih sehat. Namun dibalik dampak positif hutan, terdapat juga dampak negatif dari hutan jika hutan tersebut mengalami kerusakan sehingga menimbulkan bencana-bencana seperti banjir, hal ini disebabkan oleh kerusakan suatu lahan hutan yang seharusnya dapat menampung air hujan menjadi gundul dan terbabat habis maka daya serap lahan akan berkurang dan air hujan akan mengalir ke pemukiman penduduk di bantaran sungai yang membuatnya menjadi banjir serta juga menyebabkan longsor akibat hilangnya kekuatan penahan tanah berupa hutan di lereng bukit atau gunung. Sehingga hutan harus dapat kita jaga dan rawat dengan baik untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup yang membutuhkannya.

Seiring dengan berjalannya waktu, tidak dipungkiri bahwa manusia telah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hutan sehingga kegiatan eksploitasi hutan menimbulkan banyak terjadi kerusakan pada sumber daya hutan tersebut. Menurut *World Wide Fund to Nature* (WWF), berdasarkan catatan dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, hutan Indonesia mengalami kerusakan parah sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2 persen dari hutan Indonesia menyusut setiap tahunnya, sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah ditebang. Data dari *World Resources Institute* (WRI) menyebutkan juga separuh kehilangan hutan nasional tahun 2015 di pulau Kalimantan mencapai 323.000 hektar. Kerusakan dan kehilangan ini disebabkan oleh penebangan liar, alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit dan eksploitasi hutan. Pemerintah telah berupaya berbagai cara untuk mengurangi kerusakan hutan. Salah satu komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan bidang lingkungan hidup tertuang dalam dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 dengan menetapkan PDRB Hijau sebagai kegiatan dalam Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Data Alam dan Lingkungan Hidup. PDRB Hijau mengacu pada “*Sustainable Development Goals*” (SDGs) yang berarti “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” pada tahun periode 2016-2030 yang salah satunya yaitu mengatasi dampak perubahan dan lingkungan.

Konsep SDGs ini memperlihatkan adanya perbedaan antara PDRB Konvensional atau coklat dengan PDRB Hijau. PDRB Konvensional terdapat kekurangan yaitu tidak memasukkan nilai kerusakan yang terjadi yaitu nilai deplesi sumber daya hutan dan degradasi lingkungan, sedangkan PDRB Hijau menghitung pendapatan mulai dari produk fisik hingga kerusakan lingkungannya. Keutamaan PDRB Hijau ini yaitu adanya unsur deplesi sumber daya alam dan degradasi lingkungan sehingga dapat melihat apakah semakin berkurang, tetap atau bertambah pada aset hutan tersebut (Windhu, 2013). Penerapan PRBD Hijau diharapkan dapat meningkatkan keefisienan dalam pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kalimantan Selatan terutama di kabupaten Tabalong dan sebagai neraca pendamping bagi PDRB konvensional untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sehingga judul dalam penelitian ini adalah “**PDRB Hijau Sektor Kehutanan Hutan Alam Kabupaten Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan**”.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) berapa nilai Deplesi, Degradasi, dan Depresiasi Hutan Alam Kabupaten Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan? (2) berapa besarnya PDRB Hijau Sektor Kehutanan Kabupaten Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan?

Tujuan Penelitian

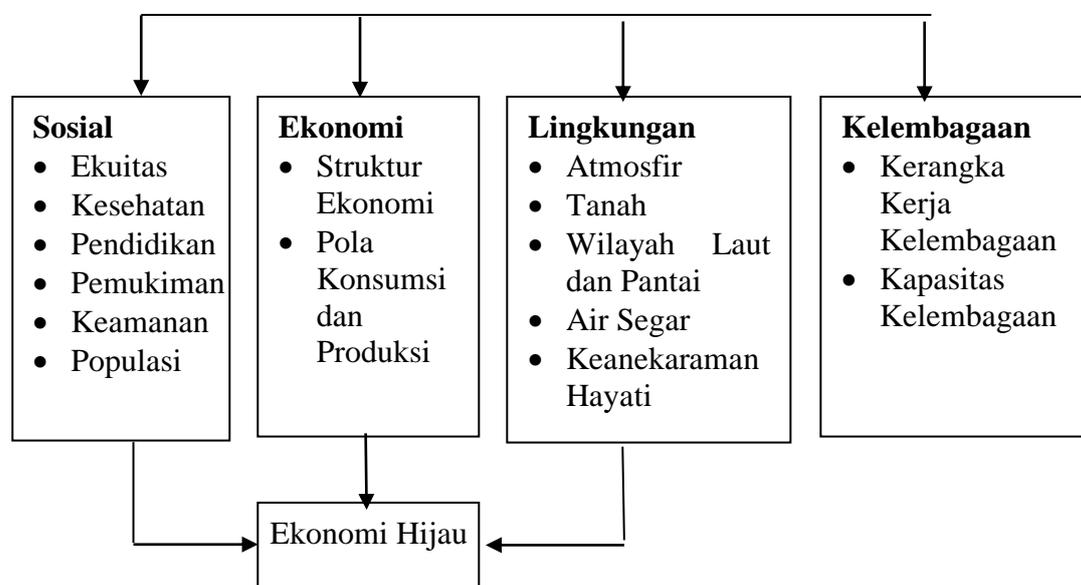
Tujuan masalah dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengidentifikasi besar nilai Depleksi, Degradasi, dan Depresiasi hutan alam kabupaten Tabalong di provinsi Kalimantan Selatan (2) untuk mengetahui nilai PDRB Hijau Sektor Kehutanan di kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi Hijau

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah banyak melaksanakan pembangunan ekonomi untuk dapat memenuhi kesejahteraan rakyat masih menggantungkan pada ekonomi berbasis sumber daya alam dengan potensi kuantifikasi dan kualitas yang tinggi, namun perlindungan dan pelestarian lingkungan masih terabaikan sehingga pemerintah menyadari berkurangnya lahan menyebabkan berkurangnya hutan beserta potensinya sehingga berkembanglah ekonomi hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan agar kegiatan perekonomian tidak merusak lingkungan.

Indonesia sudah menggunakan konsep ekonomi hijau ini dengan salah satunya ialah rencana pembangunan penetapan PDRB Hijau. Ekonomi hijau sebagai bagian integral dari konsep lebih luas pembangunan berkelanjutan menekankan itu harus berhubungan dengan pembangunan agenda lainnya seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan lingkungan atau modal alam.



Gambar 1. Ekonomi hijau alam pembangunan berkelanjutan
Produk Domestik Regional Bruto Konvensional (PDRB Konvensional)

PRDB Konvensional atau lebih dikenal dengan PDRB saja menurut Kuncoro merupakan indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu. Menurut Kuncoro (2004), perhitungan PDRB merupakan salah satu indikator makro yang dapat konstan dan masing-masing mempunyai interpretasi berbeda. Nilai absolut PDRB terbentuk dari kegiatan pemerintah daerah yang menimbulkan permintaan barang dan jasa yang direspon oleh produsen dengan menghasilkan barang dan jasa sesuai kebutuhan daerah (Rudy, 2017).

Produk Domestik Regional Bruto Hijau (PDRB Hijau)

PDRB Hijau merupakan konsep yang mengintegrasikan aspek lingkungan dalam pembangunan ekonomi dalam konteks pembangunan berkelanjutan. PDRB Hijau dimulai dari PDRB konvensional yang tidak memasukan nilai depleksi sumber

daya alam dan degradasi lingkungan yang juga disebut PDRB Cokelat. PDRB cokelat dengan hanya memasukan sumber daya alam sebagai pengurang disebut PDRB Semi Hijau. PDRB semi hijau dikurangi dengan degradasi lingkungan maka disebut sebagai PDRB Hijau. PDRB Hijau memiliki kelemahan yaitu hanya terdiri dari unsur disinsentif berupa deplesi dan degradasi sumber daya alam, disinsentif adalah perangkat untuk mengurangi kegiatan yang tidak berjalan dengan rencana tata ruang sehingga nilai PDRB Hijau akan selalu dibawah nilai PDRB konvensional. Kelemahan tersebut dikoreksi dengan memasukkan nilai insentif jasa lingkungan dengan syarat kabupaten/provinsi dapat mengelola sumber daya alam dengan baik maka akan memperoleh nilai PDRB Hijau yang lebih tinggi daripada PDRB konvensionalnya. Nilai PDRB Hijau ternyata meningkat sangat signifikan ketika memperhitungkan nilai guna tak langsung dari jasa lingkungan. Penerapan PDRB Hijau diharapkan dapat digunakan sebagai neraca pendamping bagi PDRB konvensional yang sudah umum digunakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Deplesi

Deplesi adalah berkurangnya atau adanya penyusutan sumber daya alam yang tersedia. Deplesi terdiri dari penggunaan *unit rent* atau *unit price*. Perhitungan deplesi sumber daya alam meliputi langkah-langkah : (1) Identifikasi sumber daya alam terdepleksi, (2) melakukan kuantifikasi volume fisik sumber daya alam terdepleksi, (3) melakukan perhitungan nilai ekonomi sumber daya alam terdepleksi. Nilai sumber daya alam diperoleh melalui pengalihan volume pengambilan jenis-jenis sumber daya alam dengan unit rent

Degradasi

Degradasi adalah menurunnya fungsi kemampuan suatu lingkungan dalam menyediakan barang dan jasa yang menyebabkan kerugian. Degradasi lingkungan memperlihatkan penurunan kualitas dan berkurangnya manfaat suatu lingkungan karena adanya kegiatan eksploitasi yang sedikit maupun banyak. Perhitungan degradasi lingkungan meliputi langkah-langkah yaitu (1) mengidentifikasi lingkungan yang terdegradasi, (2) kuantifikasi fisik degradasi lingkungan, (3) valuasi ekonomi degradasi lingkungan. Pendekatan yang umum yang dilakukan adalah menghitung biaya pengembalian kondisi lingkungan yang telah rusak atau disebut (*replacement cost*) dan di Indonesia itu disebut sebagai dana reboisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014. Terdapat beberapa jenis degradasi lingkungan yaitu degradasi sumber daya hutang, degradasi hutan alam, degradasi hutan tanaman, degradasi sumber daya tanah, degradasi kualitas udara, dan degradasi sumber daya air.

Depresiasi

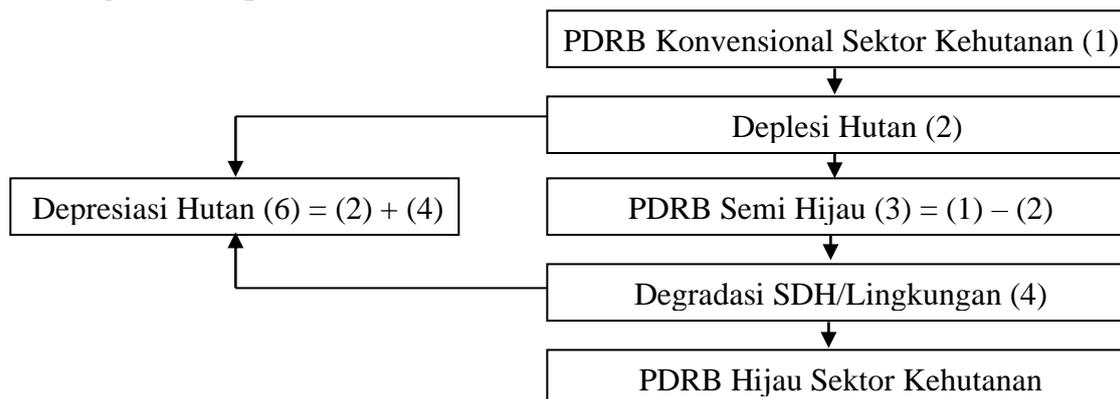
Depresiasi adalah penggabungan antara hasil dari nilai deplesi sumber daya alam dengan nilai degradasi lingkungan. Pada sumber daya hutan, depresiasi hutan adalah jumlah suatu aset hutan yang susut selama umur pemanfaatan, kemudian perhitungan depresiasi hutan yaitu penjumlahan antara deplesi sumber daya hutan dengan degradasi lingkungan.

Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai PDRB Hijau Sektor Kehutanan oleh Putra (2013) menunjukkan dalam menghitung kontribusi PDRB Hijau sektor Kehutanan melalui pendekatan jasa lingkungan memberikan hasil kegunaan dari pengelolaan sumber daya hutan melalui jasa lingkungan. Kemudian penelitian PDRB Hijau oleh Anshar (2018) untuk mengetahui kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan daerah

provinsi Kalimantan Selatan dengan pendekatan PDRB Hijau memberikan hasil berupa nilai kontribusi PDRB Sektor Kehutanan di Kalimantan Selatan.

Kerangka Konseptual



Gambar 2. Kerangka Konseptual Perhitungan PDRB Hijau Sektor Kehutanan

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu memfokuskan untuk menghitung nilai deplesi sumber daya alam hutan, degradasi lingkungan, dan depresiasi hutan serta kemudian menghitung nilai dari PDRB Hijau Sektor Kehutanan Hutan Alam di Kabupaten Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015, 2015, dan 2017.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan angka dengan memasukkan beberapa perhitungan konsep PDRB Hijau.

Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil publikasi instansi-instansi baik swasta maupun pemerintah.

Tempat/Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Tabalong, provinsi Kalimantan Selatan.

Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah perhitungan PDRB Hijau oleh Sumparmoko, dkk yang kemudian disempurnakan oleh M. Anshar Nur.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

PDRB Konvensional Sektor Kehutanan

PDRB konvensional sektor kehutanan adalah PDRB sektor kehutanan awal yang belum dihitung nilai kerusakan lingkungannya oleh pemerintah daerah kabupaten/provinsi sehingga disebut juga sebagai PDRB cokelat.

Deplesi Sumber Daya Alam Hutan

Deplesi Sumber Daya Alam Hutan adalah hasil perhitungan deplesi sumber daya hutan dengan menggunakan volume produksi kayu bulat (m^3) dan dikalikan dengan *unit rent* atau nilai sumber daya alam yang masih berada di tempatnya di alam ini.

Degradasi Lingkungan Hutan Alam

Degradasi lingkungan hutan alam adalah hasil perhitungan antara volume produksi kayu bulat (m^3) dengan dana reboisasi dikalikan dengan kurs mata uang rupiah.

Depresiasi Hutan

Depresiasi hutan adalah hasil penjumlahan deplesi sumber daya hutan dengan degradasi lingkungan dan dinyatakan dalam juta rupiah.

PDRB Hijau Sektor Kehutanan

PDRB hijau sektor kehutanan adalah nilai PDRB akhir dari perhitungan kerusakan lingkungan yang terjadi pada sumber daya hutan berupa hutan alam dan dinyatakan dalam juta rupiah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Pendokumentasi data penelitian ini adalah memperoleh data dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, selain itu dilakukan wawancara (tidak formal) dengan pihak-pihak yang terkait agar data sekunder yang diperoleh dapat dirincikan oleh pihak tersebut.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode perhitungan PDRB Hijau yang dipublikasikan Suparmoko dan Ratnaningsih (2006) yaitu sebagai berikut. Perhitungan Deplesi Sumber Daya Hutan

$$D_x = Q_x \cdot U_x$$

Dimana:

D_x = Nilai Deplesi

U_x = Unit Rent

Q_x = Volume Sumber Daya Hutan yang diambil

Perhitungan unit rent :

Harga produk hutan	Rp ...
Biaya produksi	<u>Rp ... (-)</u>
Laba layak per unit (suku bunga bank = balas jasa investasi)	<u>Rp ... (-)</u>
Unit rent produk hutan	Rp ...
Laba layak = Suku Bunga Investasi x (Harga-Biaya)	

Perhitungan Degradasi Lingkungan Hutan Alam

$$D = V \cdot (100/15) \cdot DR \cdot K_n$$

Dimana :

D = Nilai ekonomi degradasi jasa lingkungan (dalam rupiah)

V = Volume produksi

DR = Dana reboisasi untuk jenis kayu bulan (diasumsikan seperti pph sebesar 15 persen)

K_n = Nilai kurs mata uang rupiah terhadap US dollar tahun ke-n

Perhitungan Depresiasi Hutan

Depresiasi hutan adalah hasil dari perkalian dari penjumlahan antara deplesi sumber daya hutan dengan degradasi lingkungan hutan alam.

Depresiasi Hutan = Deplesi Sumber Daya Hutan + Degradasi Lingkungan Hutan Alam

HASIL DAN PEMBAHASAN
Volume Produksi Kayu Bulat

Tabel 1
Produksi Kayu Bulat
Kabupaten Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2017

No	Nama Perusahaan	Tahun					
		2015		2016		2017	
		Batang	Volume (m ³)	Batang	Volume (m ³)	Batang	Volume (m ³)
1	PT. Aya Yayang Indonesia	6.427	23.781,11	3.607	17.356,18	6.028	22.334,77
2	PT. Elbana Abadi	0	0	0	0	0	0
3	PT. Hasnur Jaya Utama	0	0	0	0	6.391	1.630,79
Jumlah		6.427	23.781,11	3.607	17.356,18	6.391	23.965,56

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 1 menunjukkan kabupaten Tabalong sebenarnya memiliki banyak perusahaan di sektor kehutanan terutama perusahaan yang memproduksi kayu bulat, namun yang masih berdiri dan memproduksi kayu bulat dengan banyak hanya satu perusahaan yaitu PT. Aya Yayang Indonesia. Terlihat bahwa perusahaan kayu telah mengalami kemunduran yang disebabkan oleh jumlah kayu yang semakin sedikit yaitu di kabupaten Tabalong yang membuat perusahaan-perusahaan kayu gulung tikar dan tidak memproduksi kayu kembali ditambah dengan teknologi yang masuk yang dapat mensubstitusi kayu sehingga tingkat permintaan konsumen pada kayu semakin menurun.

Tabel 2
Total Produksi Kayu Bulat
Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan 2015-2017

Tahun	Total Volume Produksi (m ³)
2015	23.781,11
2016	17.356,18
2017	23.965,56

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 2 diatas menunjukkan total volume produksi kayu bila tahun 2015 sebesar 23.781,11 m³, pada tahun 2016 sebesar 17.356,18 m³ dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 23.965,56 m³. Sehingga volumenya terjadi turun naik selama periode tersebut. Kemudian tabel ini juga dimaksudkan agar lebih mudah membaca nilai volume produksi yang diperlukan untuk perhitungan PDRB Hijau.

Tabel 3
Uraian Produksi Kayu Bulat
Berdasarkan Jenis Kayu Tahun 2015-2017

No	Uraian Volume Produksi Perjenis	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Kel. Kayu Meranti (m ³)	22.116,43	16.141,25	22.287,97
2	Kel. Kayu Rimba Campuran (m ³)	1.640,90	1.197,57	1.653,62
3	Kel. Kayu Indah (m ³)	23,78	17,36	23,97
Jumlah		23.781,11	17.356,18	23.965,56

Tabel 3 diatas menunjukkan pada tahun 2015 jenis kelompok kayu meranti sebanyak 22.116,43 m³, jenis kelompok kayu rimba campuran sebanyak 1.640,90 m³, jenis kayu indah sebanyak 23,78 m³. Pada tahun 2016, kayu meranti berkurang sebanyak 16.141,25 m³, jenis kayu rimba campuran sebanyak 1.197,57 m³, jenis kayu indah sebanyak 17,36 m³. Dan pada tahun 2017 untuk jenis kayu kelompok meranti mengalami kenaikan menjadi sebanyak 22.287,97 m³, jenis kelompok kayu rimba campuran mengalami kenaikan menjadi sebanyak 1.652,62 m³, jenis kelompok kayu indah bertambah menjadi sebanyak 23,97 m³. Adanya volume produksi kayu bulat perjenis dikarenakan adanya perbedaan setiap harga kayu karena jenisnya sehingga sangat diperlukan dalam perhitungan *unit rent*.

Unit Rent (Net Price)

Harga Kayu Bulat

Tabel 4
Perkiraan Harga Kayu Bulat di Provinsi Kalimantan Selatan

Jenis	Harga Patokan /HP (Rp/m ³)	Prosentase Harga Terhadap HP (Persen)	Perkiraan Harga (Rp/m ³)
Kayu Meranti	760.000	200	1.520.000
Kayu Rimba Campuran	450.000	278	1.251.000
Kayu Indah	1.500.000	173	2.595.000

Sumber : Penelitian dari Dr. Ir. H. M. Anshar Nur, MM. Dkk

Tabel 4 menunjukkan harga kayu bulat per jenis yang didasarkan pada perhitungan prosentasi terhadap harga patokan (HP) kayu bulat di Indonesia dimana HP terdapat Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.68/MENHUT-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan.

Biaya Produksi Kayu Bulat

Tabel 5
Biaya Produksi Kayu Bulat Hutan Alam

No	Kegiatan	Biaya (Rp/m ³)
1	Penebangan	1.855,11
2	Penyaradan	107.542,49
3	Muat	11.225,42
4	Bongkar	11.774,88
5	Pengangkutan	87.156,86
6	Kupas Kulit	835,06
Jumlah		220.389,82

Sumber : Penelitian dari Dr. Ir. H. M. Anshar Nur, MM. Dkk

Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa biaya penebangan sebesar Rp.1855,1/m³, biaya penyaradan sebesar Rp.107.542,49/m³, biaya muat sebesar Rp.11.225,42/m³, biaya bongkar sebesar Rp.11.774,88/m³, biaya pengangkutan sebesar Rp.87.156,86/m³, biaya kupas kulit sebesar Rp.835,06/m³, sehingga total keseluruhan biaya produksi kayu bulat hutan alam adalah sebesar Rp.220.389,82/m³.

Suku Bunga

Tabel 6
Suku Bunga Kredit Investasi

Tahun	Suku Bunga Kredit Investasi (%)
2015	13,02
2016	12,48
2017	11,89

Sumber : Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik Pusat

Tabel 6 menunjukkan suku bunga kredit investasi untuk korporasi hasil publikasi BI dan BPS. Suku bunga digunakan untuk menghitung laba layak produksi kayu bulat. Besar suku bunga tahunan didasarkan pada suku bunga bulan Januari yang bersangkutan.

Berdasarkan data-data diatas, maka perhitungan *unit rent* adalah sebagai berikut.

Tabel 7
Unit Rent Kayu Bulat Tahun 2015-2017 (Rp/m³)

Jenis	2015	2016	2017
Kayu Meranti	1.130.400	1.137.419	1.145.086
Kayu Rimba Campuran	896.425	901.990	908.070
Kayu Indah	2.065.435	2.078.259	2.092.269

Berdasarkan tabel 7 diatas, unit rent terbesar terdapat pada kelompok kayu Indah. Hal ini disebabkan oleh harga jenis kelompok kayu indah lebih tinggi dariada kelompok jenis kayu lainnya. Sehingga hal ini menunjukkan *unit rent* setiap tahunnya berubah dikarenakan perubahan suku bunga yang selalu berganti-ganti dan memberi dampak langsung terdapat *unit rent* tersebut.

Deplesi Sumber Daya Hutan

Tabel 8
Deplesi Sumber Daya Hutan Tahun 2015-2017
(Dalam Juta Rupiah)

Jenis	Tahun		
	2015	2016	2017
Kayu Merati	25.000	18.359	25.522
Kayu Rimba Campuran	1.470	1.080	1.502
Kayu Indah	49	36	50
Total	26.519	19.475	27.074

Tabel 8 diatas menunjukkan nilai Deplesi Sumber Daya Hutan Alam pada beberapa jenis kelompok Kayu Meranti lebih banyak diproduksi dibandingkan dengan jenis kelompok kayu yang lain, kemudian deplesi sumber daya hutan tahun 2015 sebesar Rp.26.519 juta, pada tahun 2016 menurun menjadi Rp.19.475 juta dan tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp.27,074 juta.

Degradasi Lingkungan Hutan Alam

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 menyebutkan besarnya dana reboisasi untuk sektor kehutanan di daerah Kalimantan dan Maluku untuk komoditas kayu bulat kelompok jenis meranti sebesar US\$ 16,5/m³, untuk kayu indah sebesar US\$ 18/m³, dan 13,5/m³ untuk kayu bulat kelompok jenis campuran (Rimba Campuran).

Tabel 9
Kurs Rupiah Terhadap US\$

Tahun	Kurs Rupiah terhadap US\$ (Rp)
2015	12.474
2016	13.898
2017	13.525

Sumber : Badan Pusat Statistik Pusat

Tabel 9 diatas menunjukkan kurs rupiah terhadap US\$ setiap tahun mengalami naik turun atau fluktuasi sehingga sedikit banyaknya perubahan maka pasti akan berpengaruh pada perhitungan degradasi lingkungan hutan alam karena perbedaan kurs.

Tabel 10
Degradasi Lingkungan Hutan Alam Tahun 2015-2017
(Dalam Juta Rupiah)

Jenis	Tahun		
	2015	2016	2017
Kayu Meranti	30.347	24.676	34.073
Kayu Rimba Campuran	1.842	1.498	2.013
Kayu Indah	36	29	39
Total	32.225	26.203	36.125

Tabel 10 menunjukkan pada tahun 2015 nilai total degradasi lingkungan hutan sebesar Rp.32.225 juta, tahun 2016 menurun menjadi sebesar Rp.26.203 juta dan tahun 2017 menjadi meningkat sebesar 36.125 juta, sehingga terlihat tahun 2017 merupakan total nilai degradasi tertinggi, hal ini disebabkan bukan hanya nilai kurs Rupiah terhadap US\$ melainkan juga volume produksi kayu bulat meningkat besar pada tahun tersebut.

Depresiasi Hutan Alam

Tabel 11
Depresiasi Hutan Alam Tahun 2015-2017
(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	Tahun		
	2015	2016	2017
Deplesi Sumber Daya Hutan	26.519	19.475	27.074
Degradasi Hutan Alam	32.225	26.203	36.125
Depresiasi Hutan Alam	58.774	45.678	63.199

Tabel 11 diatas menunjukkan depresiasi hutan alam tahun 2015 sebesar Rp.57.744 juta, tahun 2016 menurun sebesar Rp.45.678 juta dan tahun 2017 sebesar Rp.64.199 juta. Hasil ini menunjukkan total depresiasi terbesar terjadi pada tahun 2017 pula.

Nilai PDRB Hijau Sektor Kehutanan Hutan Alam Kabupaten Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 12
PDRB Konvensional Sektor Kehutanan

Kabupaten Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2017 (Dalam Juta Rupiah)	PDRB Konvensional
Tahun	
2015	34.331
2016	34.862
2017	34.534

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong

Tabel 12 diatas menunjukkan nilai PDRB konvensional pada tahun 2015 yang sebesar Rp.34.331 juta rupiah, pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp.34.862 juta rupiah, dan pada tahun 2017 menurun menjadi sebesar 34.534 juta rupiah.

Tabel 13
PDRB Hijau Sektor Kehutanan
Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2017
(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	Tahun		
	2015	2016	2017
PDRB Konvensional Sektor Kehutanan (1)	34.331	34.862	34.534
Deplesi Sumber Daya Hutan (2)	26.519	19.475	27.074
PDRB Semi Hijau Sektor Kehutanan (3) = (1) – (2)	7.812	15.387	7.460
Degradasi Lingkungan Hutan Alam (4)	32.225	26.203	36.125
PDRB Hijau Sektor Kehutanan (5)	-	-10.816	-
	24.413		28.665

Tabel 13 diatas menunjukkan jika hasil dari nilai-nilai deplesi dan nilai-nilai degradasi lingkungan hutan alam diketahui dan nilai PDRB Konvensionalnya juga diketahui, maka nilai dari PDRB Hijau Sektor Kehutanan Kabupaten Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan pun dapat dihitung, terlihat pada tahun 2015 PDRB Hijau Sektor Kehutanan sebesar Rp-24,413 juta, pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp-10,816 juta dan pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp-28.665 juta. Sehingga nilai deplesi sumber daya hutan dan nilai degradasi lingkungan hutan alam yang tinggi membuat PDRB konvensional sektor kehutanan menjadi lebih kecil bahkan mengalami minus.

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa (1) nilai deplesi sumber daya hutan tahun 2015 sebesar Rp.26,5 milyar, tahun 2016 sebesar Rp.19,4 milyar dan tahun 2017 sebesar Rp.27 milyar, nilai degradasi lingkungan hutan alam tahun 2015 sebesar Rp.32.2 milyar, tahun 2016 sebesar Rp26,2 milyar dan tahun 2017 sebesar Rp36.1 milyar, sehingga depresiasi hutan alam menjadi sebesar Rp58,77 milyar tahun 2015, Rp45,6 milyar tahun 2017 dan Rp63,1 milyar tahun 2017, (2) PDRB Hijau Sektor Kehutanan kabupaten Tabalong di Kalimantan Selatan tahun 2015 sebesar Rp-24,4 milyar, tahun 2016 menjadi sebesar Rp-10.8 milyar, dan tahun 2017 menjadi sebesar Rp.-28,6 milyar

sehingga dapat terlihat bahwa hasil dari PDRB Hijau nilainya jauh lebih kecil dibandingkan dengan PDRB Konvensionalnya maka sebenarnya kabupaten Tabalong mengalami kerugian dikarenakan penyusutan pada modal alami berupa aset hutan yang telah ditebang.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu : (1) perhitungan PDRB Hijau Sektor Kehutanan hendaknya perlu dikembangkan terutama di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan agar suatu saat kebijakan pembangunan dapat mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan (2) pengelolaan hutan alam untuk penyediaan kayu bulat perlu dilakukan secara selektif dengan menjadikan komoditas tersebut dapat memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi, dan (3) PDRB Hijau diharapkan menjadi acuan untuk menghitung nilai kompensasi dan insentif untuk pendanaan pembangunan sebagai akibat terjadinya deplesi dan degradasi maupun depresiasi sumber daya hutan yang tereksplorasi pada kabupaten Tabalong di provinsi Kalimantan Selatan.

Daftar Pustaka

- Arifin, A. (2001). *Hutan dan Kehutanan Cetakan ke-5*. Yogyakarta: Kanisius.
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- BPS. (2018). *Kabupaten Tabalong Dalam Angka 2018*. Tanjung: BPS Tabalong.
- Indonesia Kehilangan Hutan Nasional Tahun 2015*. (2018, Maret 24). Dipetik Maret 24, 2018, dari <https://wri.org>.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Nur, M. A. (2018). *Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Pendekatan Perhitungan PDRB Hijau)*. Banjarmasin: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat.
- Nur, M. A. (2018). Valuasi Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, -. *PDR Hijau Sektor Kehutanan Melalui Pendekatan Nilai Ekonomi Jasa Lingkungan*. (2019, Mei 19). Dipetik Mei 19, 2019, dari https://www.researchgate.net/publication/296195000_pdrb_hijau_sektor_kehutanan_melalui_pendekatan_nilai_ekonomi_jasa_lingkungan.
- Putra, W. (2013). *Model Perhitungan PDRB Hijau Sektor Kehutanan di Kalimantan Barat*. Kalimantan Barat: Universitas Tanjung Pura.
- Suparmoko, R. M. (2006). *PDRB Hijau (Produk Domestik Regional Bruto Hijau) Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPF.
- WWF. (2018, Maret 24). Dipetik Maret 24, 2018, dari <https://www.worldwildlife.org>.